

**PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, REPUTASI KAP DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU
PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT**
**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan
Asuransi yang Terdaftar di BEI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang



Oleh :
RIYAN SARTIKA
NIM: 1107917 / 2011

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, REPUTASI KAP DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan
Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI)**

NAMA	:	RIYAN SARTIKA
BP/NIM	:	2011 / 1107917
PROGRAM STUDI	:	AKUNTANSI
KEAHLIAN	:	KEUANGAN
FAKULTAS	:	EKONOMI

Padang, Januari 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II,

Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

**Judul : PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, REPUTASI KAP DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT (Studi Empiris
Pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Asuransi yang
Terdaftar di BEI)**

Nama : RIYAN SARTIKA
BP/NIM : 2011 / 1107917
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2014
Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
3. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
4. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan Sartika
NIM/Thn.Masuk : 1107917/2011
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/19 April 1989
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Perumahan Gunung Juaro Blok B Siteba Padang
No. Hp/Telpo : 085272475808
Judul Skripsi : Pengaruh Peran Komite Audit, Reputasi KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit (*Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim pengujian dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2014
Yang menyatakan

METERAI TEMPAL
PAJAK PEMERINTAH BANGKA
TGL: 11/02/2014
D7300ABF772617957
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP iyan Sartika
NIM:11/1107917

ABSTRAK

Pengaruh Peran Komite Audit, Reputasi Kap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI).

Oleh: Riyandika, 2011 – 1107917.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran komite audit, reputasi kap dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu Penyampaian laporan audit (studi empiris pada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI). Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai 2012. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 37 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) peran komite audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan koefisien β bernilai negatif sebesar 7.560 dan nilai signifikansi $0.196 > \alpha = 0.05$, (2) reputasi KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan koefisien β bernilai negatif sebesar 7.884 dan nilai signifikansi $0.006 < \alpha = 0.05$, (3) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan koefisien β bernilai negatif sebesar 1.328 dan nilai signifikansi $0.033 > \alpha = 0.05$. Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan: (1) Anggota komite audit harus lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan kinerja komite audit. (2) Melakukan pengujian tentang pengaruh peran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit dengan menggunakan pengukuran selain dengan *dummy*.

Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Komite Audit, Reputasi KAP, dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada Dosen penguji, Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.

5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi (Transfer) BP 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Pengurus dan keluarga besar Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Laporan Audit	8
2. Peraturan Penyampaian LK	12
3. Komite Audit	15
4. Reputasi Kantor Akuntan Publik	19
5. Ukuran Perusahaan	23
6. Penelitian Terdahulu	24

7. Hubungan Antar Variabel	25
B. Kerangka Konseptual	27
C. Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	29
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Variabel Penelitian dan Pengukurannya	32
E. Metode Analisis Data	34
1. Uji Deskriptif	34
2. Uji Asumsi Klasik	34
a. Uji Normalitas.....	34
b. Uji Multikolonieritas.....	35
c. Uji Heterokedastisitas	35
d. Uji Autokorelasi	36
3. Model Regresi Berganda	36
4. Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit Test</i>)	37
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	37
b. Uji <i>F</i> -statistik	37
5. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i>)	38
F. Definisi Operasional	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Perbankan di Indonesia	41
B. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi di Indonesia.....	43
C. Deskripsi Variabel Penelitian	45
D. Statistik Deskriptif	53
E. Analisis Data	54
F. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Pemilihan Sampel	30
2. Daftar Perusahaan Sampel	31
3. Data Penyampaian Laporan Audit	46
4. Data Jumlah Komite Audit	48
5. Data Reputasi KAP	50
6. Data Ukuran Perusahaan	52
7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	55
8. Hasil Uji Normalitas	57
9. Hasil Uji Multikolinieritas	58
10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
11. Hasil Uji Autokorelasi	60
12. Hasil Uji Regresi Berganda	61
13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	63
14. Hasil Uji F	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria	75
2. Daftar Perusahaan dan Jumlah Komite Audit	76
3. Daftar Perusahaan dan Reputasi KAP	77
4. Perusahaan dan Ukuran Perusahaan	79
5. Perusahaan dan Lama Penyampaian Laporan Audit	81
6. Hasil Olahan Statistik	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karakteristik informasi yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa segi, salah satunya adalah dari segi waktu. Ketepatan waktu pelaporan (*timeliness*) tersebut berupa tersedianya informasi saat diperlukan. Hal ini juga termasuk kedalam salah satu faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan Audit sebagai sumber informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan kehilangan relevansinya (Pratama, 2013).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan jelas telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 dan telah diperbaharui dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: 431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Dalam peraturan disebutkan bahwa penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat

tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditannya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Ini dibuat tentunya dengan tujuan agar perusahaan publik bisa mempublikasikan laporan auditannya secara tepat waktu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Di Indonesia, komite audit merupakan hal yang penting dalam *Good Corporate Governance* untuk menjembatani perbedaan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dari keputusan ketua BAPEPAM Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris memastikan agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai SAK, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal yang sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dari hal tersebut diatas, semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karna jika komite audit berperan dengan baik dapat memperkecil adanya temuan dalam audit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Begitu juga sebaliknya, jika komite audit kurang baik dalam menjalankan perannya maka dapat memperlambat penyampaian laporan audit. Oleh karna itu, dapat dilihat bahwa komite audit salah satu unsur terpenting dalam ketepatan waktu penyampaian laporan audit..

Ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan auditans tidak bisa terlepas dari jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memerlukan jasa KAP yang memiliki reputasi yang baik, karena reputasi KAP yang baik dianggap mampu menjalankan audit dengan efektif dan efisien, dengan jadwal audit yang lebih fleksibel, dan dengan auditor yang berkualitas sehingga KAP tersebut dapat menyelesaikan laporan auditnya dengan waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, semakin baik reputasi KAP maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit dan semakin kurang baik reputasi KAP maka akan semakin lama waktu penyampaian laporan audit. Dalam hal ini reputasi KAP diukur dengan KAP *Big Four* dan *Non Big Four* (Imelda dan Heri, 2007).

Terkait dengan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan auditans, ukuran perusahaan juga merupakan fungsi percepatan laporan keuangan auditans. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan auditans. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan memakan waktu lebih singkat dalam penyampain laporan auditnya di bandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki sistem yang lebih canggih, lebih diawasi oleh para pemegang saham, dan sistem pengendalian internal yang baik di bandingkan perusahaan dengan ukuran kecil.

Di sisi lain, audit merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu sehingga adakalanya penyampaian laporan audit tertunda. Standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya; pemahaman yang cukup tentang entitas serta lingkungannya termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karna kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur auditnya; perolehan bukti audit yang cukup dan tepat agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Pemenuhan standar audit oleh auditor tidak hanya berpengaruh pada lamanya waktu audit tapi juga berpengaruh pada kualitas hasil auditnya.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sebanyak 22 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun 2008 (www.vivanews.com), pada tahun 2010, sebanyak 50 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun 2009 (www.indonesiafinancetoday.com), dan pada tahun 2011, sebanyak 40 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun 2010 (www.okezone.com). Dari data tersebut diketahui bahwa ketepatan waktu masih menjadi kendala bagi perusahaan *Go Publik* di Indonesia. Fenomena inilah yang menarik untuk dicermati karena dalam peraturan telah dijelaskan bahwa rentang waktu

penyampaian laporan keuangan audit selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal neraca. Laporan keuangan juga merupakan salah satu pencerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan.

Suharli (2008), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan di Indonesia dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, KAP *Big Four*, dan *return* saham terhadap laporan keuangan 30 perusahaan terdaftar di BEJ untuk periode tahun 2002-2003. Analisis data dengan menggunakan analisis logistic dan hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas dan KAP *Big Four* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran perusahaan dan *return* saham tidak berpengaruh.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan yang disertakan laporan audit oleh perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2012 dengan judul “Pengaruh Peran Komite Audit, Reputasi KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit”.

B. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pengaruh peran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit?

2. Sejauhmana pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit?
3. Sejauhmana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh peran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.
2. Pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah referensi dalam dunia pendidikan.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun para pembuat dan pemakai laporan audit, dalam konteks variabel mana yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh peran komite audit, reputasi KAP dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada sub sektor perbankan dan sub sektor asuransi yang terdafatar di BEI.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Audit

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Elder, Randal J. dkk, 2011). Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit, seorang auditor harus memenuhi standar pelaporan audit sebagai berikut:

- a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
- b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- d. Auditor harus menyampaikan pendapat mengenai laporan keuangan, atau menyatakan suatu pendapat tidak bisa di berikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor.

Ada lima jenis pendapat yang diberikan auditor dalam laporan auditnya, yaitu (Elder, Randal J. dkk, 2011):

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Kondisi untuk laporan standar audit tanpa pengecualian diterbitkan saat kondisi berikut ini terpenuhi:

- Seluruh laporan (neraca, laba/rugi, laporan saldo laba, dan laporan aliran kas) dimasukkan dalam laporan keuangan.
- Tiga standar umum diikuti dalam seluruh penugasan.
- Bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasi dan auditor telah melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah dipenuhi.
- Laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini juga berarti pengungkapan yang

dimasukkan dalam penjelasan tambahan dan bagian lain dalam laporan keuangan sudah memadai.

- Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraph penjelasan tambahan atau modifikasi dalam laporan.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pragraf penjelas

Berikut ini adalah penyebab utama dari adanya paragraph penjelas:

- Kurangnya penerapan konsisten atas prinsip akuntansi berlaku umum.
- Keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan.
- Auditor menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang wajib diterapkan.
- Penekanan atas suatu hal.
- Pelaporan yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian

Laporan opini dengan pengecualian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan opini dengan pengecualian dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Laporan dengan pengecualian dapat berbentuk pengecualian atas ruang lingkup dan opini atau opini itu saja.

d. Pendapat tidak wajar

Opini tidak wajar digunakan hanya jika auditor yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan secara material telah salah saji atau menyesatkan karena tidak dinyatakan dengan wajar sesuai posisi keuangan atau hasil operasi dan aliran kas sesuai GAAP. Laporan audit dengan opini tidak wajar dapat muncul bila auditor mengetahui, setelah melakukan investigasi memadai, ketidaksesuaian dengan GAAP. Hal ini tidak lazim dan jarang digunakan.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Laporan dengan tidak memberikan opini diterbitkan bila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan keseluruhan dinyatakan dengan wajar. Perlunya menolak memberikan opini muncul bila terdapat pembatasan ruang lingkup luarbiasa kepada auditor atau terdapat hubungan yang tidak independen sesuai kode etik antara auditor dengan klien.

Unsur pokok laporan audit baku adalah sebagai berikut:

- a. Judul laporan yang berbunyi “Laporan Auditor Independen”
- b. Pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan
- c. Paragraf pengantar
- d. Paragraf ruang lingkup audit
- e. Paragraf pendapat
- f. Tanda tangan auditor, nama dan nomor register negarai

- g. Tanggal
- h. Nomor Register Negara

Auditor harus menunggu untuk menentukan laporan audit yang memadai untuk diterbitkan sampai seluruh bukti akumulasi dan evaluasi, termasuk seluruh langkah penyelesaian audit. Oleh karena laporan audit adalah satu-satunya yang dilihat oleh sebagian besar pengguna dari seluruh proses audit, sementara konsekuensi dari penerbitan laporan yang tidak benar sangat besar, maka laporan ini sangat penting.

Scott (2003), mengatakan bahwa informasi sebagai bukti yang dapat mempengaruhi keputusan individual. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu. Demikian juga halnya dengan laporan audit yang disampaikan akan bermanfaat jika tepat pada waktunya. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi informasi, tapi informasi tidak mungkin relevansi jika tidak tepat waktu. Ada dua faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan audit, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi profitabilitas, komite audit, dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi reputasi auditor (KAP).

2. Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia

Bapepem mengeluarkan lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996, yang mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan

auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-tiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan di keluarkannya Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 dan telah di perbarui dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 431/BL/2012 tetang Kewajiban Penyampaikan Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam ini menyatakan bahwa laporan keuangan ini harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan di sampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-empat (120 hari) setelah tanggal dikeluarkanya laporan keuangan tahunan perusahaan.

Peraturan yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 431/BL/2012 disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam adalah:

- a. Neraca,

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan (bahasa Inggris: *balance sheet* atau *statement of financial position*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari

tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:

$$\text{aset} = \text{liabilitas} + \text{ekuitas}$$

- b. Laporan Laba Rugi,

Laporan laba rugi (Inggris: *Income Statement atau Profit and Loss Statement*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.

- c. Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Perubahan Ekuitas Yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan ekuitas terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive.

- d. Laporan Arus Kas,

Laporan arus kas (Inggris: *cash flow statement atau statement of cash flows*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.

e. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis indusrtinya, dan

f. Catatan Atas Laporan Keuangan,

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

g. Laporan keuangan tahunan wajib dan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan peran dan fungsinya. Pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit diatur dalam Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang dikeluarkan oleh Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004.

Pembentukan komite audit:

- a. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit
- b. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit
- c. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris
- d. Komite audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Adapun tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan peraturan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan auditor internal.
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Komite audit juga berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, komite audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi audit internal.

Terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan auditor kepada komite audit dan manajemen, yaitu:

- a. Pembahasan tentang kecurangan dan tindakan illegal
PSA 32 (SA 316) dan PSA 31 (SA 317) mensyaratkan auditor untuk menyampaikan seluruh kecurangan dan tindakan illegal kepada komite audit dan kelompok lain yang sejenis, meskipun tidak material. Tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melakukan tugas pengawasan atas laporan keuangan.

- b. Pembahasan tentang kurangnya penendalian internal
Auditor harus menyampaikan perihal kurangnya pengendalian internal dan kelemahan material dalam desain atau pengoperasian pengendalian internal secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk perusahaan yang lebih besar, hal ini disampaikan kepada komite audit dan dalam perusahaan yang lebih

kecil, dapat dilakukan kepada pemilik perusahaan atau manajemen senior.

c. Pembahasan hal lainnya kepada komite audit

PSA 48 (SA 380) mensyaratkan auditor untuk menyampaikan infirmasi tambahan yang diperoleh selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, biasanya adalah komite audit. Tujuan dari penyampaian ini adalah agar komite audit dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola mengetahui tentang informasi penting dan relevan mengenai proses laporan keuangan dan memberikan kesempatan kepada komite audit untuk membahas hal-hal penting dengan auditor. Persyaratan PSA 48 didesain untuk mendorong komunikasi dua arah antara auditor dan pihak tata kelola. Terdapat empat tujuan dasar dari persyaratan komunikasi ini:

- Menyampaikan pertanggung jawaban auditor atas audit laporan keuangan.
- Menyediakan telaah atas ruang lingkup dan waktu penerapan audit.
- Menginformasikan temuan penting selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Menginformasikan hal-hal relevan dalam audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

d. Surat manajemen

Surat manajemen ditujukan untuk menginformasikan pihak klien mengenai rekomendasi KAP guna meningkatkan bisnis klien. Banyak KAP membuat surat manajemen untuk setiap audit untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa firma audit memberikan nilai tambah kepada klien lebih dari sekedar jasa audit. Tujuannya adalah mendorong hubungan yang lebih baik dengan manajemen dan menawarkan jasa penanganan pajak dan jasa manajemen (Elder, Randal J. dkk, 2011).

4. Reputasi KAP

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Bidang jasa KAP meliputi:

- a. Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.
- b. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya dapat melakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Badan usaha KAP dapat berbentuk:

- a. Perseorangan–hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.
- b. Persekutuan perdata atau persekutuan firma–hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan/atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
- c. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik yang diatur dalam Undang-Undang.

Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki izin akuntan publik.
- b. Menjadi anggota IAPI.
- c. Mempunyai paling sedikit 2 orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 orang diantaranya berijazah sarjana.
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- e. Memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu.
- f. Domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP.
- g. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah ruang kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.
- h. Membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan tujuan pendirian kantor (hanya untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan).
- i. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain persyaratan-persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP KAP.
- b. Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris.
- c. Memiliki surat izin akuntan publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik.

- d. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik.
- e. Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan.
- f. Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP.

KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka Cabang KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan usaha perseorangan menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, menggunakan nama seorang atau lebih Rekan akuntan publik dan ada penambahan kata “& Rekan” di belakangnya apabila jumlah akuntan publik pada KAP tersebut lebih banyak dari jumlah akuntan publik yang namanya tercantum sebagai nama KAP. Nama KAP dilarang menggunakan singkatan atau penggalan nama.

KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP atau organisasi audit asing. KAP dapat mencantumkan nama KAP atau organisasi audit asing tersebut pada nama kantor, kepala surat, dokumen dan media lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Penulisan huruf nama KAP atau organisasi audit tidak boleh melebihi besarnya huruf nama KAP.

Untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya yang dalam hal ini adalah laporan audit suatu perusahaan tentunya membutuhkan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu untuk menjamin kredibilitas laporan tersebut, perusahaan juga akan cendrung menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan mempunyai nama baik.

Reputasi KAP diukur dari besar kecilnya ukuran KAP yaitu KAP besar dalam hal ini *Big Four*, dimana KAP *Big Four* cendrung untuk lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. Hal ini diasumsikan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan audinya lebih cepat guna menjaga reputasinya (Turel, 2010). Kategori KAP *Big Four* adalah:

- a. KAP *Price Waterhouse Coopers (PWC)*,
- b. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*,
- c. KAP *Earnest & Young (EY)*,
- d. KAP *Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte)*.

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan direfleksikan dari jumlah total asset yang dimiliki, total jumlah penjualan tiap periode, jumlah total karyawan yang dimiliki, dan lain-lain. Terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih. Kedua, perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiga, perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor dan analisis keuangan (Turel, 2010).

6. Tinjauan Hasil Peneliti Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen, seperti:

- a. Rachmat Saleh (2004), meneliti tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2000-2002, menggunakan 110 perusahaan dengan variabel penelitian: rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, item-item luar biasa, dan struktur kepemilikan perusahaan. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel item-item luar biasa secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

- b. Subekti (2004), melakukan penelitian dengan sampel 75 perusahaan manufaktur dan financial yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001. Penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis industry perusahaan, jenis pendapat akuntan publik dan ukuran KAP terhadap *audit delay*. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dan rata-rata *audit delay* di Indonesia untuk tahun 2001 adalah 98,38 hari.
- c. Suharli (2008), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan di Indonesia dengan menggunakan variable ukuran perusahaan, profitabilitas, KAP *Big Four* dan *return saham* terhadap 30 laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 2002-2003. Analisis data menggunakan regresi logistic dan hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas dan KAP *Big Four* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran perusahaan dan *return saham* tidak berpengaruh.

B. Kerangka Konseptual

1. Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit
Dalam Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang dikeluarkan oleh Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 dijelaskan bahwa peran komite audit adalah membantu

para komisaris dalam melaksanakan tugasnya termasuk memastikan agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai SAK, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal yang sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen. Dari hal tersebut diatas, semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karena jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit. Begitu juga sebaliknya, jika komite audit kurang baik dalam menjalankan perannya maka dapat memperlambat penyampaian laporan audit.

2. Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit

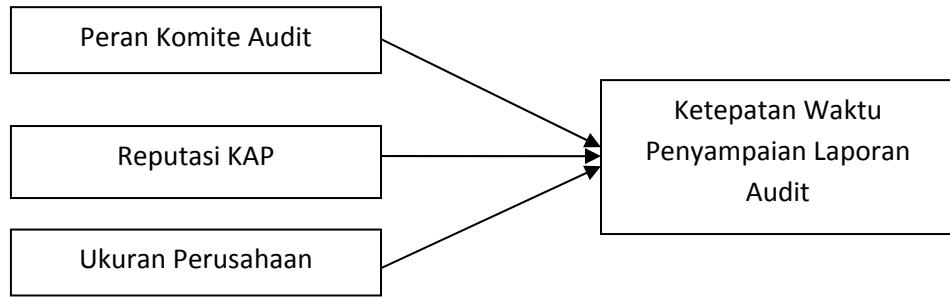
Perusahaan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan. Untuk menghasilkan laporan audit yang tepat pada waktunya, perusahaan cenderung menggunakan KAP yang mempunyai reputasi baik. KAP yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Indikator tersebut dapat dinilai dengan penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* atau bukan.

Berdasarkan hal diatas, jika perusahaan ingin hasil auditnya dikeluarkan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku maka perusahaan akan memilih auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*, sehingga laporan audit yang diharapkan akan menjadi informasi yang relevan bagi pengguna laporan audit tersebut dan begitu juga sebaliknya.

3. Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit

Ukuran perusahaan menggambarkan keadaan atau kondisi suatu perusahaan, apakah suatu perusahaan tergolong suatu perusahaan yang besar ataukah termasuk perusahaan kecil dengan melihat total asset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total asset yang lebih besar akan menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total asset lebih kecil, hal ini dikarenakan pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih. Kedua, perusahaan besar cendrung memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiga, perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor dan analisis keuangan (Turel, 2010).

Memperhatikan variabel-variabel (dependen dan independen) yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

H1: Peran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

H2: Reputasi KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah peran komite audit, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012. Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012.
2. Reputasi KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit pada perusahaan perbankan dan perusahaan

asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012.

B. Keterbatasan Penelitian

Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Periode penelitian ini hanya mencakup selama 5 tahun. Hal ini dikarenakan penulis kekurang informasi mengenai laporan audit yang dipublikasikan pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh perusahaan yang tergabung dalam kategori sektor keuangan maupun seluruh sektor industri yang terdapat di BEI karena setiap sektor industri memiliki sifat yang berbeda.
3. Banyaknya variabel yang menggunakan variabel *dummy* sehingga mempengaruhi terhadap hasil penelitian.

C. Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah melihat hasil penelitian ini antara lain:

1. Anggota komite audit harus lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan kinerja komite audit yang

berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, dengan demikian temuan dalam audit dapat dikurangi dan penyelesaian audit akan lebih singkat.

2. Melakukan pengujian tentang pengaruh peran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit dengan menggunakan pengukuran selain dengan *dummy*.
3. Melakukan pengujian tentang pengaruh peran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit dengan sampel seluruh perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor keuangan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono Jusup, Drs, MBA, Akt. 2001. Auditing (Pengauditan). STIE YKPN. Yogyakarta.
- BAPEPAM. 2003. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- BAPEPAM. 2012. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 431/BL/2012 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- BAPEPAM. 2004. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Elder, Randal J, dkk. 2011. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach-An Indonesia Adaptation*. Buku 1. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Elder, Randal J, dkk. 2011. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach-An Indonesia Adaptation*. Buku 2. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Imelda, Elsa dan H. Heri. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Jurnal Akuntansi. Vol.11, No.2.
- Kwayanti, Devi. 2011. *Hubungan Efektifitas Komite Audit terhadap Penyampaian Pelaporan Keuangan Tahunan Perusahaan Publik Sektor Manufaktur*. Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013).
- Owusu, Stephen. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market. Journal Accounting & Business. Vol. 30. Pp. 241.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.